



LAPORAN DELEGASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DALAM RANGKA MENGHADIRI *BRIEFING SESSION*
“THE ROLES OF WOMEN PARLIAMENTARIAN
IN ADVANCING GENDER RESPONSIVE-LEGISLATION FOR
SUSTAINABLE PEACE AND COVID-19 RECOVERY”.

Bogor - Jawa Barat, 23 Agustus 2022



**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- DASAR PENGIRIMAN DELEGASI
- SUSUNAN DELEGASI
- MAKSUD DAN TUJUAN
- PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS
- ANGGARAN

ISI LAPORAN

- AGENDA RAPAT PENGARAHAN
- JALANNYA RAPAT PENGARAHAN
- PARTISIPASI DELEGASI DPR RI

KESIMPULAN DAN SARAN

- KESIMPULAN
- SARAN

PENUTUP

- UCAPAN TERIMA KASIH
- KETERANGAN LAMPIRAN
- KATA PENUTUP



Lawang Salapan, Bogor.

LAPORAN DELEGASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA MENGHADIRI *BRIEFING SESSION*
“THE ROLES OF WOMEN PARLIAMENTARIAN IN ADVANCING GENDER
RESPONSIVE-LEGISLATION FOR SUSTAINABLE PEACE AND
COVID-19 RECOVERY”.

Bogor - Jawa Barat, 23 Agustus 2022

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anggota parlemen perempuan selama ini berkontribusi dan memainkan peranan penting di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dalam menempatkan kesetaraan gender sebagai agenda inti dan telah menjadi forum untuk mengumpulkan aspirasi perempuan di seluruh kawasan Asia Tenggara. Fakta bahwa terdapat peningkatan jumlah perempuan yang duduk di parlemen tingkat nasional negara-negara anggota ASEAN masih belum berbanding lurus dengan pencapaian kesetaraan. *International Parliamentary Union* (IPU) mencatat terdapat sedikit kemajuan pada tahun 2021 terkait partisipasi perempuan di kawasan Asia, di mana perempuan mendapatkan prosentase sedikit di atas 21% kursi parlemen tingkat nasional. Sementara di kawasan Asia Tenggara, *ASEAN Gender Outlook 2021* mencatat kurang lebih 20% kursi di parlemen tingkat nasional ditempati oleh perempuan.

Berdasarkan penelitian *Westminster Foundation for Democracy* (WFD) dengan *Global Institute for Women's Leadership* terlihat bahwa perempuan mengubah kerangka politik dengan membawa pertimbangan yang lebih kuat pada bidang-bidang masalah yang berpotensi memberikan hasil lebih baik bagi perempuan serta anak perempuan dan juga secara langsung memberikan manfaat kepada laki-laki dan anak laki-laki bersamaan dengan membawa gaya kepemimpinan yang kolaboratif serta inklusif ke dalam lingkup politik. Penelitian juga menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki perwakilan perempuan yang lebih banyak di lembaga legislatif dan mampu menjalankan kepemimpinan secara otentik, memiliki korelasi positif dengan perdamaian yang lebih berkelanjutan dan setara gender serta dapat mengurangi tingkat konflik. Efek ini memberikan keseimbangan gender di dalam legislatif dan di tempat di mana partai politik berkuasa.

Selain itu, ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF/Kerangka Pemulihan Komprehensif ASEAN) juga mensyaratkan pendekatan

pengarusutamaan gender dan *responsive gender* dalam kaitannya dengan rencana implementasinya di seluruh ASEAN. ACRF merupakan strategi yang terkonsolidasi bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menunjukkan tindakan terkoordinasi antar negara anggota beserta mitranya dalam mengatasi pandemi COVID-19.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara konsisten telah dan masih memperjuangkan kepemimpinan politik perempuan di organisasi antar parlemen melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) yang memiliki mandat melaksanakan diplomasi parlemen. Terlebih saat ini, DPR RI memiliki Ketua Parlemen Perempuan pertama, sehingga penegasan kebutuhan akan perempuan agar memiliki lebih banyak kursi di parlemen menjadi lebih menggemakan dari sebelumnya. BKSAP telah sukses mendorong agenda inklusi sosial, pemberdayaan ekonomi, kesetaraan gender dalam politik, kesetaraan akses pendidikan di berbagai forum internasional antar-parlemen, seperti *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* dan AIPA. Dalam Sidang Umum tahunannya, AIPA telah mengadopsi resolusi yang mendukung kemajuan perempuan dalam politik, ekonomi dan seluruh bidang. AIPA melalui berbagai resolusi yang dihasilkannya mendorong negara-negara Anggota ASEAN untuk memperkuat upayanya dalam memastikan bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tetap menjadi prioritas dalam semua rencana dan program, serta alokasi anggaran negara/sumber-sumber yang tepat di bidang pembangunan perempuan.

Sebagai persiapan menghadiri *Coordinating Meeting of WAIPA* di tanggal 30 Agustus 2022 yang akan membahas masukan dan usulan agenda untuk Sidang tahunan WAIPA pada November mendatang sebagai bagian dari rangkaian Sidang Umum AIPA, BKSAP bekerjasama dengan WFD dan *Global Affairs Canada* menyelenggarakan kegiatan *briefing session*. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkaya inspirasi dan pengetahuan tentang bagaimana para anggota parlemen perempuan mengambil bagian dalam memajukan proses tanggap gender di lembaga legislatif, terutama, dalam mendukung perdamaian berkelanjutan dan pemulihan COVID-19. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk berbagi situasi terkini mengenai perkembangan pencapaian dan upaya menyempurnakan kesetaraan gender di level kawasan, terutama antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. *Briefing session* ini menyasar para ketua komisi dan 19 Anggota Parlemen perempuan di BKSAP.

B. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI

Partisipasi Delegasi DPR RI dalam *Briefing Session* “the Roles of Women Parliamentarian in Advancing Gender Responsive-Legislation for Sustainable Peace and Covid-19 Recovery” pada tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan pada Surat Tugas Nomor 34/D/ST-PD.DN/BKSAP-KSR/8/2022 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Perjalanan Dinas ke Bogor, Jawa Barat dalam rangka kegiatan *Westminster Foundation for Democracy* (WFD).

C. SUSUNAN DELEGASI

Susunan Delegasi DPR RI ke *Briefing Session* bersama WFD dan *Global Affairs Canada* adalah sebagai berikut:



Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Si
F-P-Gerindra/A-86
Ketua BKSAP | Anggota Komisi I



Gilang Dhiela Fararez, S.H., LL.M
F-PDIP/A-139
Wakil Ketua BKSAP | Anggota Komisi XI



Putu Supadma Rudana, M.B.A.
F-PD/A-563
Wakil Ketua BKSAP | Anggota Komisi VI



Dr. H. Mardani, M.Eng.
F-PKS/A-422
Wakil Ketua BKSAP | Anggota Komisi II



Ir. H. Achmad Hafisz Tohir
F-PAN/A-487
Wakil Ketua BKSAP | Anggota Komisi XI



Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos,
MCOMN&MEDIAS
F-PDIP/A-262
Anggota BKSAP | Anggota Komisi I



Ina Ammania
F-PDIP/A-218
Anggota BKSAP | Anggota Komisi VIII



Dra. Adriana Charlotte Dondokambey,
M.Si
F-PDIP/A-252
Anggota BKSAP | Anggota Komisi IX



Vanda Sarundajang
F-PDIP/A-254
Anggota BKSAP | Anggota Komisi X



Puteri Anetta Komarudin
F-Golkar/A-295
Anggota BKSAP | Anggota Komisi XI



Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si.
F-Golkar/A-324
Anggota BKSAP | Anggota Komisi III



Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si
F-P Gerindra/A-78
Anggota BKSAP | Anggota Komisi X



Katherine Anggela Oendoen
F-P Gerindra/A-123
Anggota BKSAP | Anggota Komisi VII



Ratih Megasari Singkaru, M.Sc
F-P Nasdem/A-402
Anggota BKSAP | Anggota Komisi X



Arzeti Bilbina, SE, MAP
F-PKB/A-32
Anggota BKSAP | Anggota Komisi I



Linda Megawati, SE, M.Si
F-PD/A-545
Anggota BKSAP | Anggota Komisi IX



Drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si.
F-PAN/A-489
Anggota BKSAP | Anggota Komisi X



Ema Umiyyatul Chusnah
F-PPP/A-471
Anggota BKSAP | Anggota Komisi IV

Selama persidangan berlangsung, Delegasi DPR RI didampingi oleh Pejabat dan Staf Setjen DPR RI serta Tenaga Ahli BKSAP.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud partisipasi Delegasi DPR RI pada *Briefing Session* tentang peran Anggota Parlemen perempuan dalam memajukan undang-undang yang responsif akan gender untuk pemulihan COVID-19 dan perdamaian berkelanjutan yaitu:

- Memperbarui situasi tentang bagaimana para anggota parlemen perempuan mengambil bagian dalam memajukan proses tanggap gender di lembaga legislatif, terutama, dalam mendukung perdamaian berkelanjutan dan selama pemulihan COVID-19 serta memberikan pembaruan tingkat kawasan antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand; dan
- Menginventarisir pelajaran yang didapat dan rekomendasi bagi Koordinasi Komisi Rapat WAIPA.

2. TUJUAN

Sedangkan tujuan *Briefing Session* ini yaitu:

- Membekali Anggota Parlemen perempuan dengan informasi isu gender yang relevan untuk diusulkan pada pertemuan WAIPA akhir bulan Agustus tahun 2022, dan juga sebagai agenda pembahasan Sidang WAIPA pada SIUM ke-43 AIPA;
- Mendapatkan masukan praktik terbaik dari Malaysia dan Thailand, pemetaan masalah yang belum terselesaikan terkait isu gender dan solusi yang dapat diusulkan;

- Membangun jaringan kerjasama Anggota Parlemen Indonesia dengan Anggota Parlemen Malaysia dan Thailand untuk kolaborasi penyelesaian isu-isu di kawasan, terutama yang berkenaan dengan kesetaraan gender.

E. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Serangkaian kegiatan dilakukan dalam rangka persiapan Delegasi DPR RI berpartisipasi dalam *Briefing Session* tentang peran Anggota Parlemen perempuan dalam memajukan undang-undang yang *responsive gender* untuk perdamaian berkelanjutan dan pemulihan COVID-19, baik dalam hal teknis maupun substansi. Guna kelancaran tugas Delegasi dari segi teknis, Sekretariat BKSAP bekerjasama dengan WFD telah mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung berlangsungnya kegiatan. Sementara dari segi substansi, Sekretariat bersama Tenaga Ahli telah menyusun *remarks* dan posisi delegasi terhadap topik yang dibahas.

G. ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Dewan dengan biaya penyelenggaraan sebesar Rp. 435.010.000,- (empat *ratus tiga puluh lima juta sepuluh ribu rupiah*).

II. ISI LAPORAN

A. AGENDA RAPAT PENGARAHAN (*BRIEFING SESSION*)

- *Opening and Welcome Remarks by Agus Wijayanto (Indonesia Country Representative, WFD)*
- *Opening Remarks by Dr. Fadli Zon (Ketua BKSAP)*
- *Remarks by Irine Yusiana Roba Putri (Anggota Komisi I/ Vice Chair of WAIPA / Indonesia WPL Ambassador)*
- *Remarks by Louis-Thomas Laurin, (Second Secretary – Trade, Mission of Canada to ASEAN, Government of Canada)*
- *Keynote Speech “Advancing Gender Responsive Legislation for Sustainable Peace and COVID-19 Recovery through Women Political Participation” by Ryce Chanchai (ASEAN Governance Peace and Security Specialist / WPS Regional Programme Lead, UN Women Asia Pacific)*
- *Panel Discussion on Women Parliamentarian Roles in Advancing Gender Responsive Legislation for Sustainable Peace and COVID-19 Recovery moderated by Vanda Sarundajang (Anggota Komisi X)*
 - a. Luluk Nur Hamidah (Sekjen Kaukus Parlemen Perempuan Indonesia, Anggota Komisi IV DPR RI)

- b. Rohani Karim (*Chair of the All-Party Parliamentary Group Malaysia on Sustainable Development Goals, House of Representatives of Malaysia*)
- c. Saratsanun Unnoporn (Anggota Parlemen Thailand)
- *Interactive Discussion*
- *Closing Remarks and Recommendation by Irine Yusiana Roba Putri*
- *Group Photo*
- *BKSAP Women Parliamentarians Internal Consolidation*

B. JALANNYA RAPAT PENGARAHAN (*BRIEFING SESSION*)

Briefing Session tentang peran Anggota Parlemen perempuan dalam memajukan undang-undang yang *responsive gender* untuk perdamaian berkelanjutan dan pemulihan COVID-19 diselenggarakan secara hybrid pada tanggal 23 Agustus 2022.

Rapat ini dihadiri oleh 18 (delapan belas) orang Anggota Parlemen Perempuan BKSAP secara fisik, Pimpinan BKSAP dari Gedung DPR, *Second Secretary Mission of Canada to ASEAN*, Sekretaris Jenderal Kaukus Parlemen Perempuan Indonesia, Anggota Parlemen Malaysia dan Thailand.

Opening Session

Briefing Session dibuka pada hari Selasa, 23 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB diawali dengan pidato pembukaan dari Agus Wijayanto, selaku *Indonesia Country Representative* dari WFD.

1. Secara menyeluruh, Agus Wijayanto dalam pidatonya menyampaikan secara rinci agenda dari *briefing session* hari tersebut, dan menyampaikan pentingnya peran, partisipasi dan representasi perempuan di dalam dunia politik, termasuk Parlemen untuk menciptakan legislasi yang menjunjung tinggi kesetaraan perempuan. Hal tersebut akan berkontribusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh perempuan, dan lebih dari itu, menciptakan pemulihan COVID-19 yang inklusif dan juga perdamaian yang berkelanjutan di tingkat kawasan dan dunia.
2. Acara dilanjutkan dengan Pidato Pembukaan dari Dr. Fadli Zon selaku Ketua BKSAP. Dalam pidatonya, Dr. Fadli Zon menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi, parlemen merupakan institusi yang tentunya paling kapabel ketika berbicara mengenai legislasi yang lebih responsif terhadap isu gender, melalui fungsi legislatif, anggaran dan pengawasannya.



Dalam forum-forum regional seperti AIPA atau forum internasional seperti IPU, DPR RI melalui BKSAP secara konsisten menyuarakan bahwa kesetaraan gender yang dimana bukan hanya bagian dari hak asasi manusia, tetapi juga merupakan landasan bagi terwujudnya perdamaian, dunia yang sejahtera dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, BKSAP selalu menekankan di setiap kesempatan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik adalah kunci dalam memastikan kebijakan yang lebih responsif akan gender. Saat ini, ada 123 anggota parlemen perempuan di DPR atau sekitar 21.39% dari total kuota. Walaupun masih di bawah target 30%, namun kami optimistis, akan lebih banyak lagi anggota parlemen perempuan yang akan bergabung di DPR RI pada periode selanjutnya.

Ketua BKSAP dalam paparannya juga menyampaikan bahwa anggota perempuan di BKSAP aktif bekerja dalam tiap inisiatif terkait isu perempuan dalam kerangka diplomasi parlemen, antara lain melalui Woman Political Leaders (WPL) dan yang terbaru adalah ketika Delegasi anggota perempuan BKSAP menghadiri pertemuan ketiga Euro-Asian Women Forum di Russia. Pada pertemuan tersebut delegasi menekankan pentingnya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Agenda kelima, yaitu kesetaraan gender.

3. Selain Ketua BKSAP, Irine Yusiana Roba Putri selaku Wakil Ketua Di WAIPA dan anggota BKSAP menjabarkan bahwa dalam konteks dampak konflik dan pandemi COVID-19, perempuan masih merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kedua isu tersebut.

Beberapa hal menarik juga menjadi fokus dalam pidatonya, termasuk fakta dimana jika perempuan terlibat dalam sebuah proses perdamaian, kesepakatan atau perjanjian yang dihasilkan 20 persen lebih berpeluang untuk bertahan selama paling tidak, dua tahun, dan 35 persen lebih berpeluang untuk bertahan selama 15 tahun. Oleh sebab itu, merupakan tanggung jawab anggota parlemen perempuan untuk tidak

hanya memainkan peran penting dalam menyusun undang-undang yang lebih responsif terhadap gender, tetapi juga dalam rangka meningkatkan peran dalam mewujudkan perdamaian berkelanjutan dan pemulihan dari pandemi COVID-19.

4. *Chargée d'Affaires, the Mission of Canada to ASEAN*, Vicky Singmin menggarisbawahi pentingnya partisipasi perempuan dalam pemulihan dari konflik & krisis, dan juga mencatat ancaman *Violence Against Women in Politics* terhadap demokrasi dan kebutuhan untuk memikirkan kembali pendekatan dalam menutup kesenjangan gender. Selain itu, Vicky Singmin memberikan beberapa poin penting di pembukaan acara, termasuk peran penting penjaga perdamaian perempuan untuk keamanan dan stabilitas negara dan dunia. Selanjutnya, Vicky Singmin juga mendorong adanya *people-centered approach* dalam tindakan-tindakan yang diambil untuk pemulihan COVID-19 dan terciptanya dunia yang inklusif. Dalam hal ini juga, sangatlah penting untuk memperkuat kerjasama di kawasan dan juga antara ASEAN dan Canada.
5. Ryce Chanchai, sebagai *ASEAN Governance Peace and Security Specialist / WPS Regional Programme Lead, UN Women Asia Pacific*, mencatat bahwa partisipasi politik perempuan tidak meningkat dengan kecepatan yang sama dengan pembangunan ekonomi, dan meskipun peran dari kuota gender berpengaruh, kita perlu mengatasi norma-norma gender dan juga sosial yang bersifat negatif yang mendasarinya. Selain itu, Ryce Chanchai juga menyoroti perlunya memasukkan pendekatan berbasis gender di dalam kerja parlemen untuk membuat undang-undang, anggaran, dan mengawasi pemerintah.

Panel Discussion

Diskusi panel yang bertema “*Women Parliamentarian Roles in Advancing Gender Responsive Legislation for Sustainable Peace and COVID-19 Recovery*” dimoderasi oleh Vanda Sarundajang yang merupakan Anggota BKSAP, dan dihadiri oleh beberapa narasumber anggota parlemen perempuan di negara kawasan ASEAN, yaitu:

- Luluk Nur Hamidah | Anggota Komisi IV DPR RI
 - Rohani Karim | Ketua All-Party Parliamentary Group Malaysia terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Parlemen Malaysia
 - Saratsanun Unopporn MP | Anggota Parlemen Thailand
1. Dalam pembukannya Vanda Sarundajang selaku moderator menyampaikan beberapa obyektif dari tema diskusi panel “*Women Parliamentarian Roles in Advancing Gender Responsive Legislation for Sustainable Peace and COVID-19 Recovery*”, yang dimana menawarkan *platform* bagi anggota parlemen dan pemangku kepentingan terkait lainnya

untuk mengidentifikasi dan mengkaji secara menyeluruh peran dan tantangan anggota parlemen perempuan dalam mengadopsi undang-undang yang reponsif akan gender, terutama untuk perdamaian berkelanjutan dan pemulihan COVID-19. Vanda juga berharap bahwa hasil diskusi ini dapat membantu *Committee Chairs* dan Anggota Parlemen Perempuan BKSAP dalam persiapan *Coordinating Committee Meeting on Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)* yang akan digelar akhir bulan ini.

2. Selanjutnya, Anggota Komisi IV DPR RI, Luluk Nur Hamidah menjabarkan bahwa pandemic COVID-19 telah memberikan beberapa tantangan terhadap perempuan, dan ini termasuk dalam kekerasan berbasis gender. Dalam hal ini, partisipasi dan keterwakilannya perempuan di parlemen perlu ditingkatkan karena sementara anggota parlemen hanya mewakili 20 persen dari total keseluruhan anggota DPR RI, untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan.
3. Selain Luluk Nur Hamidah, Rohani Karim selaku Ketua *All-Party Parliamentary Group Malaysia* terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Parlemen Malaysia, menyampaikan bahwa melokalisasikan SDGs, terutama kesetaraan gender perlu diterapkan dan juga berfokus kepada isu-isu ketenagakerjaan, diantara yang lainnya. Rohani Karim melalui panel diskusi ini juga menegaskan bahwa perlunya undang-undang yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan yang juga dapat menghindari diskriminasi terhadap perempuan, dan memastikan kesetaraan di depan hukum tanpa memandang gender.
4. Sebagai narasumber terakhir yang menjabarkan presentasinya, Anggota Parlemen Thailand, Saratsanun Unopporn mencatat bahwa selama krisis COVID-19, secara tidak proporsional menunjukkan banyaknya perempuan yang kehilangan pekerjaan dan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga selama adanya *lockdown*. Tentunya, ini juga berpengaruh kepada kesehatan mental para perempuan yang mengalami hal tersebut. Saratsanun Unopporn juga menyampaikan bahwa Parlemen Thailand telah membawa isu-isu perempuan ke permukaan dan adanya pembuatan undang-undang untuk melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan, seperti perlindungan dari kekerasan seksual, dan dukungan cuti hamil dan melahirkan.

Closing Session and Results Achieved

Dalam penutupan acara, Irine Yusiana Roba Putri menyimpulkan hasil-hasil yang dicapai dalam briefing session ini dan perlunya dilaksanakan, yaitu:

1. Tetap mengadvokasikan dan meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pemulihan COVID-19.

2. Terus meningkatkan visibilitas dan pengarusutamaan pemajuan hak asasi manusia dan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan berbasis gender, dalam pertemuan AIPA khususnya di Sidang Umum.
3. Meneguhkan kembali pentingnya interseksionalitas dalam partisipasi politik perempuan. Karenanya, kerjasama yang kuat antara BKSAP dengan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) ke depannya perlu dikedepankan, untuk turut meningkatkan peran anggota legislatif perempuan dalam posisi strategis khususnya di kawasan dan internasional.

C. PARTISIPASI DELEGASI DPR RI

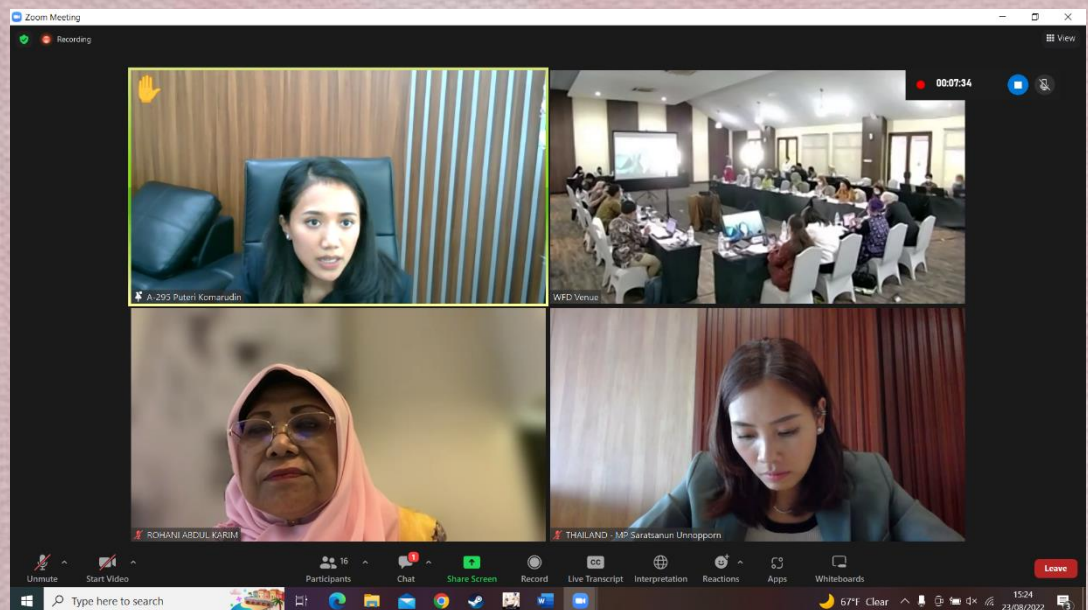
Seluruh anggota perempuan BKSAP DPR RI yang hadir selain sebagai *keynote speakers* dan *panelists* yang telah disampaikan juga sangat aktif dalam menyampaikan pandangannya terhadap topik dari *briefing session* yang diselenggarakan.



1. Anggota BKSAP DPR RI, Ratih Megasari Singkarru mengingatkan bahwa sejarah konflik dan krisis kemanusiaan dapat menghasilkan dampak buruk seperti kemiskinan, perpindahan massal serta kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Oleh karena itu, memastikan keterwakilan perempuan, partisipasi dan dimasukkannya perspektif gender dalam proses perdamaian merupakan hal yang mendesak. Dalam hal ini, Indonesia sangat berkomitmen untuk memastikan peran perempuan dalam proses perdamaian dan keamanan, contohnya dengan memprakarsai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2538 (2020) tentang

perempuan dalam pemeliharaan perdamaian; dan pada tahun 2021, berkontribusi pada setidaknya 183 wanita penjaga perdamaian yang bertugas di berbagai Misi Perdamaian PBB. Selain itu, Parlemen juga harus memastikan bahwa negara tidak hanya memilih lebih banyak perempuan penjaga perdamaian, tetapi juga memastikan bahwa mereka mempunyai peran yang krusial dalam posisi mereka untuk mendorong perubahan positif.

2. Selain Ratih Megasari Singkarru mengingatkan Anggota BKSAP DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa juga menyampaikan pandangannya bahwa Memajukan dan memastikan legislasi yang responsif akan gender di masa yang penuh tantangan ini membutuhkan pendekatan partisipasi publik yang proaktif dan inklusif, termasuk terhadap perempuan. Partisipasi penuh dan efektif dari perempuan merupakan prasyarat untuk menghapus ketidaksetaraan gender dan mencapai SDGs pada tahun 2030. Namun demikian, partisipasi publik tidak boleh berakhir hanya dengan mendengarkan keluhan mereka, tetapi juga memasukkan dan menerapkan perspektif gender dalam proses legislatif pemulihan COVID-19, dan memastikan bahwa undang-undang dan/atau langkah-langkah yang akan diambil menargetkan dan bermanfaat bagi seluruh perempuan – jika tidak, masyarakat hanya akan melihat ketimpangan sosial-ekonomi yang lebih besar.



3. Putri Anneta Komaruddin sebagai Anggota BKSAP DPR RI menjabarkan bahwa COVID-19 mempunyai dampak yang besar terhadap perempuan, termasuk karir dan kehidupan personal yang juga mempengaruhi kemampuan finansialnya. Oleh karena itu, tindakan-tindakan terkait pemulihan COVID-19 harus responsif akan gender. Dalam hal ini, penting untuk melakukan pendekatan *gender-responsive budgeting* (GRB),

termasuk dalam siklus anggaran nasional (*national budget cycle*). GRB dapat mengidentifikasi kebutuhan perempuan, dan juga mengadopsi dan mengimplementasikan program atau tindakan yang relevan lainnya.



4. Untuk yang terakhir melakukan intervensi terhadap topik dalam diskusi panel, anggota BKSAP DPR RI, Dra. Adriana Charlotte Dondokambey, mendorong keterlibatan perempuan untuk berpartisipasi aktif di bidang apapun, termasuk politik. Peran perempuan merupakan hal yang sangat penting. Contohnya di dalam keluarga, perempuan mempunyai peran yang besar dalam mendidik anak untuk berkembang.



Di akhir *interactive discussion*, seluruh panelis pun mencatat seluruh tanggapan dan rekomendasi dari anggota DPR RI yang melakukan intervensi di sesi panel dan secara menyeluruh menyatakan kembali komitmen dan dukungan untuk adanya pemulihan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengarustamakan gender dalam tindakan-tindakan pemerintah ataupun aktivitas dan tugas Parlemen.

Contohnya, Luluk Nur Hamidah memberikan tanggapan bahwa Indonesia, melalui DPR RI, diantara tindakan lainnya, telah menginisiasi beberapa undang-undang yang fokus kepada isu perempuan dan untuk menciptakan dunia dan negara yang lebih inklusif, termasuk Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (*RUU KIA*).

Selain itu, Rohani Karim juga menjelaskan di bidang *peace and security* bahwa Malaysia telah juga berkontribusi untuk memastikan adanya partisipasi perempuan dalam misi *peace-keeping*, termasuk di Palestina. Terkait dengan *gender-responsive budgeting*, WFD Malaysia telah mengikutsertakan tidak hanya anggota parlemen perempuan akan tetapi juga laki-laki, untuk mendiskusikan, diantara lainnya, *gender-responsive budgeting*. Dalam hal ini, aspek gender juga telah dipertimbangkan dan dimasukkan kedalam aktivitas pemerintahan Malaysia, termasuk kementeriannya.

Sebagai penanggap di akhir diskusi, anggota Parlemen Thailand, Saratsanun Unopporn, juga menganjurkan adanya peran anak muda dalam pengambilan keputusan, dan juga pentingnya implementasi dari legislasi tersebut, bukan hanya membuat legislasinya saja.



III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Melalui acara briefing session “the Roles of Women Parliamentarian in Advancing Gender Responsive-Legislation for Sustainable Peace and Covid-19 Recovery”, pimpinan dan para anggota perempuan BKSAP DPR RI yang hadir dapat menyampaikan pandangan-pandangannya dan menyerap aspirasi dan rekomendasi terkait apa yang perlu dilakukan di level nasional dan regional untuk mencapai pemulihan COVID-19 yang responsif akan gender dan juga perdamaian berkelanjutan.
2. Pentingnya untuk seluruh anggota parlemen di perempuan di kawasan ASEAN untuk memperkuat kerja sama dalam bidang gender equality dan mengarustamakannya dalam aktivitas-aktivitas Parlemen.
3. Mempererat kerja sama secara internal diantara anggota perempuan DPR RI.

B. SARAN

1. Menindaklanjuti berbagai aspirasi dan saran dari berbagai pihak yang hadir dalam acara briefing session, apalagi kita mempunyai anggota BKSAP DPR RI yang menjabat sebagai *Vice-Chair of WAIPA*. Hal tersebut dapat diperjuangkan dan dilaksanakan di dalam pertemuan *Coordinating Committee of WAIPA* dan juga *AIPA General Assembly*.
2. BKSAP untuk memasukan point-point penting terkait fungsi dan tugasnya di Parlemen untuk persiapan pertempuan *Coordinating Committee of WAIPA*, dan juga melaksakannya di tingkat nasional.

IV. PENUTUP

A. UCAPAN TERIMA KASIH

Delegasi menyampaikan ucapan terima kasih kepada *Westminster Foundation for Democracy* dan *Global Affairs Canada* yang telah bekerjasama memfasilitasi kegiatan ini sehingga dapat berjalan lancar dan sukses.

Delegasi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekretariat dan semua pihak yang mendukung kelancaran pelaksanaan *Briefing Session* ini.

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran hasil-hasil persidangan sebagai berikut:

- 1) *Agenda*
- 2) *Term of Reference*
- 3) *List of Participants*
- 4) Dokumentasi Foto

C. KATA PENUTUP

Demikianlah Laporan Delegasi DPR RI ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kinerja Delegasi DPR RI pada *Briefing Session “The Roles Of Women Parliamentarian In Advancing Gender Responsive-Legislation For Sustainable Peace And Covid-19 Recovery”* yang dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 23 Agustus 2022.

Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juni 2022

a.n. Delegasi

Ketua Delegasi,

Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc
A-86



DAFTAR LAMPIRAN

Agenda ●

Term of Reference ●

List of Participants ●

Dokumentasi Foto ●



Gunung Salak, Bogor.



Briefing session on the roles of women parliamentarians in advancing gender-responsive legislation for sustainable peace and COVID-19 recovery

Bogor, 23 August 2022

Day, Date: Tuesday, 23 August 2022
Time: 13.00–16.00 WIB (UTC+7)
Venue: Hotel NEO+ Green Savana Sentul City
Address: Komplek Taman Budaya Sentul City, Jl. Siliwangi No.1, Bogor

For virtual attendance, the event is available on following space:

Meeting URL <https://bit.ly/3PRTxF9>
Meeting ID 894 3146 4930
Meeting Passcode WAIPA2022!

Agenda

Time WIB (UTC +7)	Description
12.00–13.00	Lunch and Networking Session
13.00–13.10	Welcome <ul style="list-style-type: none">• Agus Wijayanto Indonesia Country Representative, WFD
13.10–13.20	Remarks <ul style="list-style-type: none">• Irine Yusiana Roba Putri MP Member of the Defense, Intelligence, Informatics, and Foreign Affairs Commission / Vice Chair of WAIPA / Indonesia WPL Ambassador, DPR RI
13.20–13.30	Remarks <ul style="list-style-type: none">• Vicky Singmin Chargé d'affaires of Mission of Canada to ASEAN
13.30–13.45	Opening Remarks <ul style="list-style-type: none">• Fadli Zon MP Chair of the Inter-Parliamentary Cooperation Committee (BKSAP), DPR RI
13.45–14.00	Keynote Speech “Advancing Gender Responsive Legislation for Sustainable Peace and COVID-19 Recovery through Women Political Participation” <ul style="list-style-type: none">• Ryce Chanchai ASEAN Governance Peace and Security Specialist / WPS Regional Programme Lead, UN Women Asia Pacific

14.00–15.00	<p>Panel Discussion on Women Parliamentarian Roles in Advancing Gender Responsive Legislation for Sustainable Peace and COVID-19 Recovery</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luluk Nur Hamidah MP Member of the Agricultural, Plantations, Forestry, Maritime, Fisheries, and Food Affairs Commission / Secretary General of the Indonesian Women Parliamentarian Caucus, DPR RI • Rohani Karim MP Chair of the All-Party Parliamentary Group Malaysia on Sustainable Development Goals, House of Representatives of Malaysia • Saratsanun Unnopporn MP Member of the Thailand Parliament <p>Chaired by Vanda Sarundajang MP Member of Education, Youth, Sport, Tourism, Arts and Culture Affairs Commission, DPR RI</p>
15.00–15.45	Interactive Discussion
15.45–15.55	<p>Closing Remarks and Recommendation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Irine Yusiana Roba Putri MP Member of the Defense, Intelligence, Informatics, and Foreign Affairs Committee / Vice Chair of WAIPA / Indonesia WPL Ambassador, DPR RI
15.55–16.00	Group Photo
*TBC	BKSAP Women Parliamentarians Internal Consolidation

TERMS OF REFERENCE

Briefing session on the roles of women parliamentarians in advancing gender-responsive legislation for sustainable peace and COVID-19 recovery

Bogor, 23 August 2022

The Westminster Foundation for Democracy (WFD, <https://www.wfd.org>) is the UK public body dedicated to supporting democracy around the world. WFD works in partnership with political parties, parliaments, and civil society organisations to create a fairer and more inclusive, accountable, and transparent political system. WFD strengthens the capacity of these key democratic institutions, helping ensure they have the systems, knowledge, and skills to perform effectively. WFD also fosters improved democratic processes, bringing together individuals and institutions, and encouraging them to work together to solve concrete problems, applying democratic values and principles.

Context

In Indonesia, WFD has been providing supports to the national parliaments, particularly the Indonesian House of Representatives (Lower House), and, to a certain extent, the House of the Regional Representatives (Upper House) and sub-national parliaments. WFD's works have focused on: a) evidenced based legislation making processes including legislative drafting, pre-legislative scrutiny, and post-legislative scrutiny; b) parliamentary oversight, particularly the financial oversight by its public accounts committee; c) the parliament internal accountability and transparency through strengthening the Parliament internal audit and open parliament; and d) various thematic issues as agreed and cross cutting issues including human rights, gender and inclusion as well as climate change and environment.

WFD's work on [women's political leadership](#)¹ considers the social, cultural, economic, and political factors that stop women from fully participating in politics and governance. We work with partners to develop systems and strategies that challenge and transform them. Our programmes help to embed gender analysis throughout all aspects of parliamentary business, support women's political leadership and end violence against women in politics. WFD has commenced a women's political leadership programme funded by Global Affairs Canada, working across Indonesia, Malaysia and Thailand. The objective of this 18-month programme is to advance equality in politics and wider society through creating a more enabling environment² for politically active women³ to participate and exercise leadership in politics at national and local levels in these three countries and within the regional context of the Association of Southeast Asian Countries (ASEAN).

¹ Including: [Women Political Leaders: The Impact of Gender on Democracy](#)

² By enabling environment, we mean an environment in which there are more women in politics as well as in leadership positions, where women in politics are better protected from violence, and where women's issues are better addressed in law and policy.

³ In this programme, the term 'politically active women' means all women involved in political activities including women elected to offices at the national and sub-national levels, members and candidates of political parties, elected or appointed government officials at the local, national and international levels, as well as women involved in political life through engagement in civil society, campaigning, advocacy, or voting.

Background

Women Parliamentarian is a critical committee in the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly to maintain gender equality as the core of the agenda and to gather women aspiration across the Southeast Asia region. Although there is an increased number of women taking seats in the national parliament of ASEAN members states, but the parity has not been reached. The International Parliamentary Union (IPU) recorded there was little progress in 2021 on women's participation in the Asia region, where women picked up slightly above 21% of national parliament seats.⁴ The number seems to be decreased in the Southeast Asia region whereas the ASEAN Gender Outlook 2021 recorded there are 20% of seats at national parliament are occupied by women.⁵

WFD's research with the Global Institute for Women's Leadership shows that women are altering the political framework in bringing more robust consideration of issue areas that can deliver better outcomes for women and girls and that also directly benefit men and boys while also bringing collaborative and inclusive leadership styles into a political environment. This research has shown that states with greater female representation in the legislature, who are able to authentically exercise their leadership, have a positive correlation with longer-lasting and gender-equal peace and reduced levels of conflict. This effect is moderated by the gender balance within the legislature and by which political party is in power.⁶ In addition, the ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) also requires gender mainstreaming and gender-responsive approaches in its response and implementation plan across ASEAN sectors. ACRF is a consolidated strategy for ASEAN member states in addressing coordinated actions among member states and their partners in overcoming the COVID-19 pandemic.⁷

The Indonesian House of Representatives (DPR RI) has consistently fought for women political leadership in the inter-parliamentary organisations through the Indonesian Committee for Inter-Parliamentary Cooperation (BKSAP DPR RI), which is a House Committee with the mandate of parliamentary diplomacy. Especially now that DPR RI has the First Women Speaker of the House, amplifying to the needs of more women sitting in parliament has been more focal than before. BKSAP DPR RI has succeeded in pushing the agenda of social inclusion, economic empowerment, gender equality in politics, equal access to education (particularly STEM education), among others, as an outcome document in various international inter-parliamentary organisations, the Inter Parliamentary Union (IPU) and the Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) and AIPA. In its annual General Assembly, AIPA has adopted resolutions that support advancement of women in politics, economic and all spheres of lives. In its resolutions, AIPA encourages ASEAN Member States to redouble their efforts to ensure that gender equality and women's empowerment remain priorities in all plans and programs, and allocation from national budget/of appropriate resources in the field of women development.

⁴ [Women in Parliament in 2021 | Inter-Parliamentary Union \(ipu.org\)](https://www.ipu.org/women-in-parliament-2021)

⁵ [ASEAN Gender Outlook | UN Women Data Hub](https://data.unwomen.org/asean-gender-outlook-2021)

⁶ M Cowper-Coles, *Women political leaders: the impact of gender on democracy*, Global Institute for Women's Leadership and Westminster Foundation for Democracy, King's College London, 2020, <https://www.kcl.ac.uk/giwl/assets/women-political-leaders.pdf>

⁷ ASEAN Secretariat, 2020, [ASEAN Comprehensive Recovery Framework](https://aseansec.org/asean-comprehensive-recovery-framework) & [ASEAN Comprehensive Recovery Framework: implementation plan](https://aseansec.org/asean-comprehensive-recovery-framework-implementation-plan)

As part of the ASEAN Women Political Leadership programme, WFD, in partnership with Global Affairs Canada, aims to conduct a briefing session to update the situation of how women parliamentarians taking part in advancing gender responsive process in the legislative, especially in promoting sustainable peace and during COVID-19 recovery while also feed into regional update across Indonesia, Malaysia, and Thailand. The briefing session will target committee chairs and 19 women MPs of BKSAP prior to the Coordinating Committee Meeting on Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA) to take place on the 30th of August 2022, to reflect the 43rd AIPA General Assembly in November 2022.

Objectives

- Updating the situation of how women parliamentarians taking part for advancing gender responsive process in the legislative, especially in promoting sustainable peace and during COVID-19 recovery while also feed into regional update across Indonesia, Malaysia, and Thailand
- Stock-taking lessons learned and recommendation for the WAIPA Coordination Committee Meeting
- Familiarising/initiating coalition for change for Indonesian MPs and collaboration with MPs from Malaysia and Thailand

Format & Schedule

The activity will be conducted in a hybrid mode of in-person participation by MPs in Indonesia and virtual for speakers abroad. Simultaneous interpretation in English and Indonesian will be provided. Schedule for the event is as follows:

Day, Date: Tuesday, 23 August 2022
Time: 13.00–16.00 WIB (UTC+7)
Venue: Hotel NEO+ Green Savana Sentul City
Address: Komplek Taman Budaya Sentul City, Jl. Siliwangi No.1, Bogor

For virtual attendance, the event is available on following space:

Meeting URL <https://bit.ly/3PRTxF9>
Meeting ID 894 3146 4930
Meeting Passcode WAIPA2022!

Agenda

Time WIB (UTC +7)	Description
12.00–13.00	Lunch and Networking Session
13.00–13.10	Welcome <ul style="list-style-type: none">• Agus Wijayanto Indonesia Country Representative, WFD
13.10–13.20	Remarks

	<ul style="list-style-type: none"> • Irine Yusiana Roba Putri MP Member of the Defense, Intelligence, Informatics, and Foreign Affairs Commission / Vice Chair of WAIPA / Indonesia WPL Ambassador, DPR RI
13.20–13.30	Remarks <ul style="list-style-type: none"> • Vicky Singmin Chargé d'affaires of Mission of Canada to ASEAN
13.30–13.45	Opening Remarks <ul style="list-style-type: none"> • Fadli Zon MP Chair of the Inter-Parliamentary Cooperation Committee (BKSAP), DPR RI
13.45–14.00	Keynote Speech “Advancing Gender Responsive Legislation for Sustainable Peace and COVID-19 Recovery through Women Political Participation” <ul style="list-style-type: none"> • Ryce Chanchai ASEAN Governance Peace and Security Specialist / WPS Regional Programme Lead, UN Women Asia Pacific
14.00–15.00	Panel Discussion on Women Parliamentarian Roles in Advancing Gender Responsive Legislation for Sustainable Peace and COVID-19 Recovery <ul style="list-style-type: none"> • Luluk Nur Hamidah MP Member of the Agricultural, Plantations, Forestry, Maritime, Fisheries, and Food Affairs Commission / Secretary General of the Indonesian Women Parliamentarian Caucus, DPR RI • Rohani Karim MP Chair of the All-Party Parliamentary Group Malaysia on Sustainable Development Goals, House of Representatives of Malaysia • Saratsanun Unnopporn MP Member of the Thailand Parliament <p>Chaired by Vanda Sarundajang MP Member of Education, Youth, Sport, Tourism, Arts and Culture Affairs Commission, DPR RI</p>
15.00–15.45	Interactive Discussion
15.45–15.55	Closing Remarks and Recommendation <ul style="list-style-type: none"> • Irine Yusiana Roba Putri MP Member of the Defense, Intelligence, Informatics, and Foreign Affairs Committee / Vice Chair of WAIPA / Indonesia WPL Ambassador, DPR RI
15.55–16.00	Group Photo
*TBC	BKSAP Women Parliamentarians Internal Consolidation

Annex 1. Brief Note on the Committee of Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)

Following the adoption of the ASEAN Declaration on 8 August 1967, parliamentarians of the founding ASEAN member states initiated the ASEAN inter-parliamentary forum which received a positive response. The Jakarta forum prompted the initiation of a parliamentary cooperation forum by the Indonesian House of Representatives (DPR RI) alongside the parliaments of the other four member states: Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand.

After the first ASEAN Parliamentary Meeting (APM) in Jakarta in January 1975. The ASEAN Inter-Parliamentary Organisation (AIPO) was created in 1977. In 2003, with progress being made towards the ASEAN Economic Community (AEC), the idea of an ASEAN Parliament, which had first been proposed by the Philippines in 1980, resurfaced.

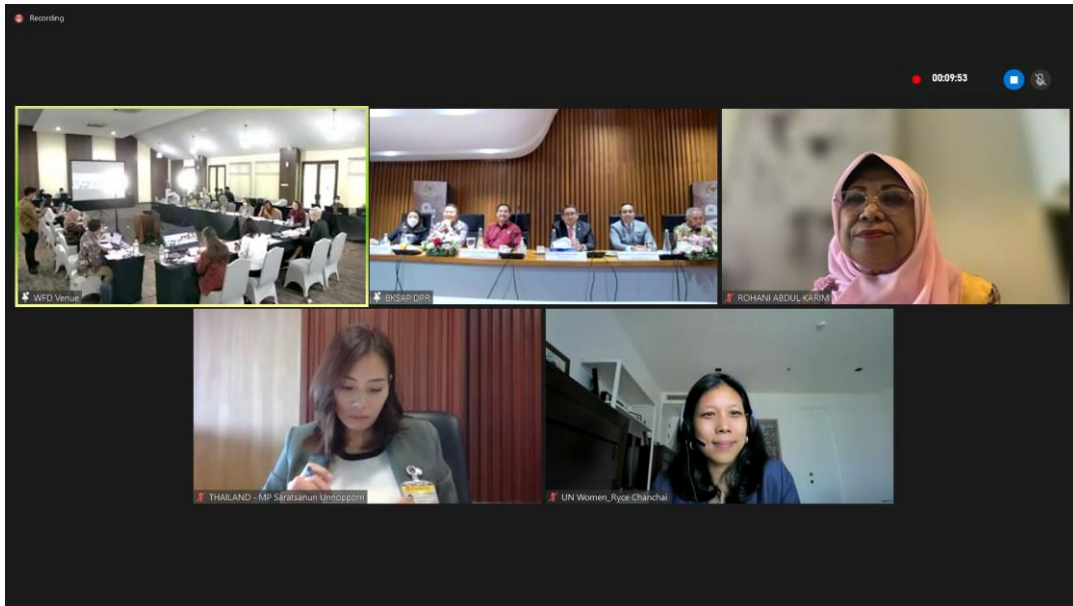
At the 27th AIPO General Assembly in Cebu City in September 2006, a consensus was formed toward the long-term goal of creating an ASEAN Parliament. The parliamentarians then agreed to first proceed with transforming AIPO into a more closely integrated institution. AIPO then evolved into the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), and the statutes were amended to include an additional aim: to promote the principles of human rights, democracy, peace, security, and prosperity.

AIPA's working language is English and its organisation is made up of the General Assembly, the Presidency, the Executive Committee, the Committees, the Secretariat, the Secretary-General, and the National Secretariats. Additionally, AIPA has established several standing committees—one of which is the Committee of Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA). Formed in 1988 (originally as WAIPO) to enhance the participation and representation of women in AIPA and in ASEAN member states' parliaments at large, WAIPA holds an annual meeting during the AIPA General Assembly. The Committee is chaired by a woman parliamentarian from the host country of the AIPA General Assembly.

WAIPA debates a wide variety of issues that contribute to increasing visibility and representation of women in politics and public posts. The aims and objectives of WAIPA include:

- Increasing women's participation and representation in AIPA.
- Increasing women's representation in parliaments in the ASEAN region.
- Making women's issues the priority agenda of the General Assembly.
- Holding annual meetings on the sidelines of the General Assembly.
- Facilitating networking among women parliamentarians in ASEAN.
- Establish networking with other women's associations and through meetings on women's issues with regional and international organisations.

Dokumentasi Kegiatan







**Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Gedung Nusantara III, Lantai 6, Komplek MPR/ DPR/ DPD RI
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

Telp. : 021-5715842

Faks. : 021-5752132

Email : ksr.bksapdpr@gmail.com | oprkbksap@yahoo.com



@bksapdpr



@bksapdpri



BKSAP DPRRI



BKSAP DPRRI



<http://ksap.dpr.go.id>